

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR (Studi Kasus Tahun 2011-2013)



OLEH:

AHMAD JUNAEDI

B 111 10 017

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(Studi Kasus Tahun 2011-2013)**

OLEH:

AHMAD JUNAEDI

B 111 10 017

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(Studi Kasus Tahun 2011-2013)**

Disusun dan diajukan oleh :

AHMAD JUNAEDI

B111 10 017

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Program Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, Tanggal 10 Juni 2014
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



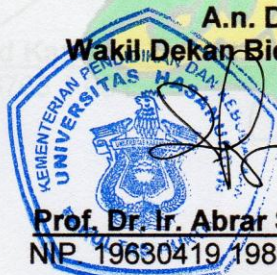
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : AHMAD JUNAEDI

Nomor Induk : B 111 10 017

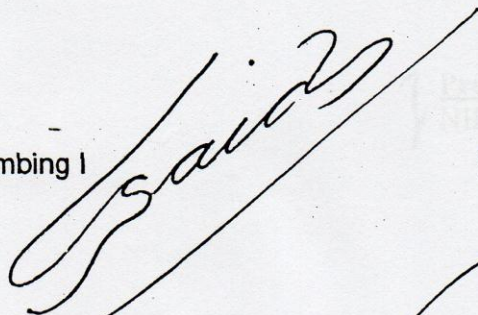
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan
Terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar
(Studi Kasus Tahun 2011-2013)

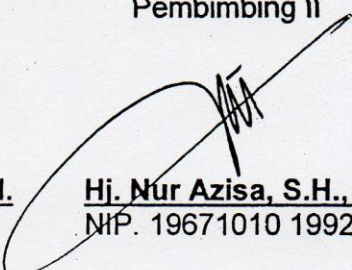
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2014

Pembimbing I


Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II


Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **AHMAD JUNAEDI**

No. Pokok : B111 10 017

Bagian : Hukum Pidana

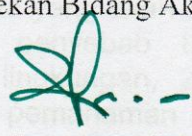
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan terhadap
Anak di Kabupaten Polewali Mandar
(Studi Kasus Tahun 2011-2013)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2014

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

AHMAD JUNAEDI (B111 10 017), Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2011-2013), di bawah bimbingan Bapak M. Said Karim sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Kabupten Polewali Mandar, dan kedua untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, dengan lokasi penelitian pada Polres Polewali Mandar, Pengadilan Negeri Polewali Mandar dan Lembaga Permasyarakatan KLAS II B Polewali Mandar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak adalah 1) Faktor lingkungan, 2) Faktor alkohol, 3) Faktor teknologi, 4) Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama. Upaya menanggulangi kejahatan pemerkosaan terhadap anak adalah dengan melakukan 2 cara yaitu melalui upaya preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. Yang kedua yaitu melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur patut penulis haturkan kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2011-2013)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, karena itu pastinya dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda **Muh. Jufri** dan Ibunda **Marawiah** serta Adinda **Akbar Jaelani** yang selama ini tidak pernah berhenti untuk selalu berdoa untuk kebaikan penulis dan memberikan dukungan, baik itu moril maupun materil.
2. Orang yang juga sudah penulis anggap sebagai orang tua sendiri, Ayahanda **Muh. Yusup, SP** dan Ibunda **Nur Dahlia** yang selama ini

telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Kemudian buat adik penulis yang baru saja lahir, **Muh. Alif Zulkifli**, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara.

3. Seluruh keluarga besar penulis yang selama ini senantiasa mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
4. **Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina, M.A.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya.
5. **Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.**, selaku pelaksana tugas sementara dekan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin, serta pembantu Dekan I **Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.**, Pembantu Dekan II **Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.**, serta Pembantu Dekan III **Bapak Romi Librayanto, S.H.,M.H.**, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. **Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.**, selaku pembimbing I dan Ibu **Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II. Atas bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.**, **Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.**, dan **Bapak Kaisaruddin kamaruddin, S.H.**, selaku tim penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada penulis.

8. Para Dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan masukan, didikan dan bantuannya.
9. Keluarga Besar LPMH-UH yang selama ini telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman baru yang mungkin penulis tak akan dapatkan di tempat lain.
10. Sahabat-sahabatku di UKM Sepak Bola FH-UH dan teman-teman seperjuangan di Turnamen Liga Unhas.
11. Teman-teman KKN Gel. 85 Posko Desa Pince Pute, Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, **Herianto, Kyas Herlambang, Risky Adelyani dan Mirza Amelia.**
12. Angkatan 2010 (Legitimasi), khususnya kepada teman-teman terdekat penulis, **Fari, Amiruddin, Amhy, Ali Akbar, Ophal, Adhan, Dimas, Farit, Avil, Chaerul, Imam, Abdi, Adiyat, Zikin, Dayat, Adjat, Fandi, dan lain-lain.**
13. Orang yang sudah penulis anggap sebagai adik sendiri, **Dian Martin (Melan)** yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. **Bapak Kasat Reskrim Mihardi. M. S.H., SIK., Bapak Drs. Muh. Basri, S.H. M.Si., dan Bapak Hasanuddin** yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
15. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam penyusunan administrasi akademik.

16. Dan buat semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya, kalian luar biasa.

Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin. Terima Kasih.

Makassar, 8 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi	6
B. Pengertian Kejahatan	10
C. Perkosaan (<i>Rape</i>)	14
D. Tinjauan Umum Mengenai Anak	21
E. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan	29
F. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Dan Sumber Data	39

C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar	41
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang mempunyai tingkat populasi penduduk yang cukup tinggi. Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk tertinggi ke-4 setelah Cina, India, dan Amerika dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta.

Sebagai negara berkembang, Indonesia saat ini sedang fokus untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek yang menjadi fokus pemerintah adalah pembangunan di bidang hukum. Hal ini tentunya menjadi harapan semua masyarakat agar penegakan hukum di Indonesia semakin baik.

Perkembangan hukum akan selalu seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula perkembangan permasalahan hukum juga akan berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat khususnya di bidang teknologi. Namun disadari atau tidak perkembangan itu selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Tentu dampak negatif dari perkembangan itu dapat berakibat timbulnya kejahatan. Bentuk kejahatan

seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan, penipuan, dan lain-lain sebagainya, sudah banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.

Begitu banyak kejahatan yang terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat. Bahkan terkadang korbannya bukan saja orang-orang dewasa, akan tetapi anak pun sering menjadi korban dari suatu kejahatan. Salah satu kasus kejahatan yang saat ini banyak menimpa anak adalah kasus pemerkosaan.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan suatu masalah hukum yang sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Sebagaimana yang diketahui bahwa tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak dibawah umur yang pada umumnya belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita dewasa.

Biasanya dalam kasus pemerkosaan terhadap anak, kebanyakan dari korban belum memahami atau mengerti, mereka tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban sebuah tindak kejahatan yang dimana ia telah diperkosa. Bagi anak perempuan, bahayanya ialah bahwa ia akan menjadi ibu tanpa kawin dengan usia yang masih terlalu muda atau terpaksa kawin tanpa pertimbangan yang sehat.¹

Dalam kasus ini sangat jarang pelaku tertangkap pada saat sedang melakukan perbuatan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus

¹ Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008. hlm 59.

tersebut baru diketahui berkat laporan dari pihak keluarga korban, setelah menemukan luka di tubuh korban atau pun karena pengakuan yang dilakukan sendiri oleh korban bahwa ia telah diperkosa oleh pelaku kejahatan tersebut.

KUHP merumuskan perbuatan perkosaan (rape) pada pasal 285 yang bunyinya sebagai berikut.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena telah melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”²

Jika melihat hal di atas, hukuman maksimal dua belas tahun nyatanya belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku perkosaan. Apalagi jika kita melihat dari segi korbannya, pemerkosaan dengan korban anak seharusnya hukumannya bisa lebih berat dibanding pemerkosaan dengan korban wanita dewasa. Berdasarkan kenyataan, ada hukuman pemerkosa anak wanita yang masih berumur 7 tahun, dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, sedangkan terhadap pemerkosa wanita dewasa, ada yang dijatuhi hukuman yang lebih berat (9 tahun).³

Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus, mengingat anak merupakan aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Oleh karena itu, bukan hanya dari pihak keluarga akan tetapi seluruh lapisan masyarakat harus

² *Ibid.* hlm 49.

³ *Ibid.* hlm 51.

ikut berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi dan menjaga anak dari segala hal yang dapat membahayakan keselamatannya.

Tujuan perlindungan anak sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak), yaitu bahwa:

“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Kejahatan seksual terhadap anak bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Salah satu daerah yang menjadi perhatian dari penulis adalah kasus pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Sangat miris tentunya melihat hal ini, mengingat Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang saat ini sedang fokus berbenah dan membangun. Tujuan dari sebuah pembangunan tentunya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi tujuan itu tentu sulit terwujud jika masih saja banyak terjadi permasalahan hukum khususnya yang berhubungan dengan anak, mengingat anak memegang peranan penting sebagai generasi penerus suatu bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, yang nantinya akan tertuang dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis

Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2011-2013)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran dari penulis untuk masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan terhadap anak.
2. Diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi dari Perancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan.⁴

Menurut Hari Saherodji, kriminologi mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁵

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:⁶

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti

⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Refleksi. 2010. hlm 1.

⁵ Hari Saherodji. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta. Aksara Baru. 1980. hlm 9.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Pers. 2011. hlm 9.

apa. Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang penjahatan yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa :

a) *Hygiene* Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakuka oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b) Politik kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c) Kriminalistik (*policie scientific*)

ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Wolfgang, Savitz dan Jonhston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:⁷

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatannya maupun pelakunya.

⁷ *Ibid.* hlm 12.

Dalam bukunya yang berjudul “Penanggulangan Kejahatan”, Soedjono merumuskan bahwa:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan”.⁸

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang (selanjutnya UU). Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe–tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.

Sutherland menambahkan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisiplin. Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lainnya.⁹

⁸ Soedjono D. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Alumni. 1976. hlm 25.

⁹ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.cit.*, hlm 3.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kejahatan perkosaan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang arti kejahatan itu sendiri.

Secara etimologi, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, mencuri, merampok, menipu, korupsi dan lain-lain. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan pengertian kejahatan secara mendetail, akan tetapi kejahatan itu diatur dalam buku dua KUHP yaitu Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP.

A.S. Alam memberikan dua sudut pandang tentang kejahatan, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam

¹⁰ *Ibid.* hlm. 16.

perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya. Namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Contoh di dalam hal ini adalah bila seseorang muslimin meminum minuman keras sampai mabuk. Perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Gerson W. Bawengan membagi tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:¹¹

¹¹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*. Jakarta. PT. Refika Aditama. 2001. hlm. 27.

1) Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

2) Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3) Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya dalam KUHP hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat menjumpai hukum pidana Khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi, atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Hampir sama dengan A.S. Alam dan Gerson W. Bawengan, A.Qirom Syamsuddin dan E. sumaryono memberikan penjelasan mengenai kejahatan sebagai berikut:¹²

¹² *Ibid.* hlm. 18.

1) Segi sosiologi

Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan amoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan.

2) Segi psikologi

Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

3) Segi yuridis

Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana.

Selain pendapat diatas, masih banyak pandangan ataupun pendapat lain dari beberapa ahli mengenai arti kejahatan, antara lain sebagai berikut:

R. Soesilo dalam bukunya menyebutkan bahwa:¹³

“Kejahatan secara yuridis adalah kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP. Misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun)”.

Adapun Edwin H. Sutherland menekankan bahwa:¹⁴

“Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan

¹³ R. Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor. Politea. 1985. hlm. 13.

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op.cit., hlm.11.

terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.

Selanjutnya W.A. Bonger menyatakan bahwa:¹⁵

“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan”.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diancam dengan suatu sanksi tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan sebagainya.

C. Perkosaan (*Rape*)

1. Pengertian Perkosaan

Perkosaan merupakan salah satu jenis tindak pidana kesusilaan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.¹⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan teruang dalam Pasal 285 yang berbunyi, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang

¹⁵ *Ibid.* hlm. 14.

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Op. cit., hlm. 29.

bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.¹⁷ Dalam pasal tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan antara lainn sebagai berikut:

- 1) Wanita belum dewasa yang masih perawan
- 2) Wanita dewasa yang masi perawan
- 3) Wanita yang sudah tidak perawan lagi
- 4) Wanita yang sedang bersuami.¹⁸

b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku.

Seiring perkembangannya, saat ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan hanya *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari perkosaan yang antara lain sebagai berikut:¹⁹

a. Perbuatan tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam *vagina*), tetapi juga:

- Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.

¹⁷ *Kitab Undan-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*. Penghimpun Solahuddin. Cetakan 1. Jakarta. Visimedia. 2008. Pasal 285 KUHP

¹⁸ Leden Marpaung. Op.cit.,. hlm 50.

¹⁹ Topo Santoso. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta. IND-HILL-CO. 1997. hlm 67.

- Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam *vagina* atau mulut wanita.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan dari korban.
- c. Objeknya bukan hanya seorang wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/ pingsan dan anak dibawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (diluar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karen kekeliruan, kesehatan, penipuan atau karena dibawah umur.

Karakteristik utama dalam perkosaan ialah bahwa perkosaan bukanlah ekspresi agresivitas dari seksualitas, akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas.²⁰

Adapun pelaku perkosaan terhadap anak yang dapat juga disebut dengan “*child molester*”, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:²¹

1. *Immature* : para pelaku melakukan perkosaan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
2. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak

²⁰ Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung. Mandar maju. 1995. hlm. 108.

²¹ *Ibid.* hlm 45.

mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.

3. *Sociopathic* : para pelaku perkosaan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
4. *Pathological* : para pelaku perkosaan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya.
5. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori diatas.

2. Jenis-Jenis Perkosaan

Pemeriksaan cenderung merupakan aktivitas yang berulang, bukan perbuatan yang sekali sudah, dan biasanya direncanakan. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana perkosaan juga diatur dalam beberapa kebijakan legislasi yang di dalam rumusannya juga mengatur kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan. Hanya saja istilah yang digunakan berbeda yaitu kekerasan seksual. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²²

a) Pasal 285

“Barangsiapa siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Apabila rumusan perkosaan di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatannya: memaksa;
- Caranya: dengan kekerasan dan ancaman kekerasan;
- Objek: seorang perempuan bukan istrinya;
- Bersetubuh dengan dia.

b) Pasal 286

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Apabila dirinci rumusan Pasal 286 tersebut di atas, terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif:

- Perbuatannya: bersetubuh;
- Objeknya: seorang perempuan bukan istrinya;
- Dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Unsur subjektif:

²² Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2005. hlm. 62-70.

- Diketuahuinya perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

c) Pasal 287 ayat (1)

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Apabila rumusan Pasal 287 ayat (1) dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif:

- Perbuatannya: bersetubuh;
- Objek: dengan perempuan di luar kawin;
- Yang umurnya belum lima belas tahun; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin;

Unsur subjektif:

- Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun.

d) Pasal 288 ayat (1)

“Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganyabahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kejahatan pada Pasal 288 ayat (1) terdapa unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif:

- Perbuatannya: bersetubuh;
- Objek: dengan perempuan istrinya yang belum waktunya dikawin;
- Menimbulkan akibat luka-luka;

Unsur subjektif:

- Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan itu belum waktunya untuk dikawin.

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a) Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

b) Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

Ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ayat (2) : Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan rumusan Pasal 81 di atas, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah:

- Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Adanya tipu muslihat;
- Adanya serangkaian kebohongan;
- Adanya bujukan;
- Adanya persetubuhan dengan seorang anak.

D. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sampai saat ini belum ada keseragaman mengenai definisi anak. Ada beberapa peraturan perundang-undangan mengenai anak, namun masing-masing peraturan tersebut mempunyai pengertian yang berbeda mengenai definisi dan kriteria

anak. Beberapa pengertian anak dan batasan umur anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain :

1. Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

4. Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum kawin
5. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) ditentukan bahwa batasan untuk disebut seorang anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.
6. Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 171 bahwa batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 tahun dan belum pernah kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) KUHAP).

Memang sangat banyak pandangan mengenai pengertian dari anak atau kriteria anak. Beberapa negara pun mempunyai pengertian masing-masing mengenai kriteria anak. Contohnya saja di amerika, batas umur anak delapan sampai delapan belas tahun. Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 18 tahun dengan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila berumur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Selanjutnya *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun. Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang *Standar Minimum Rule for the Administration of juvenile Justice*, menentukan batas umur anak sampai 18 tahun.

Dengan demikian apabila melihat berbagai pengertian di atas, yang dimaksud anak atau orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

2. Perlindungan Anak

Mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, maka sudah seharusnya mereka mendapat perlindungan dari berbagai hal yang dapat mengancam keselamatannya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai anak, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi:
perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2 : Penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 : perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:²³

1. Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai hal penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang

²³ Wagianti soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta. Rafika Aditama. 2005.

dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniru yang kritis).

Usaha perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara.

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Adapun yang menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah dalam hal perlindungan anak diatur dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);

- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak).

Kewajiban tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menurut Arif Gosita, ada beberapa rumusan mengenai hukum perlindungan anak antara lain:²⁴

- a. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan social (hukum). Ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integrative;
- b. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interralasi antara

²⁴ Wagianti soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta. Rafika Aditama. 2005.

fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi hukum perlindungan anak tersebut;

- c. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti : kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga social (keluarga, sekolah, pesantren, dan sebagainya);
- d. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum;
- e. Hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, karena hukumnya merupakan suatu alat atau sarana yang dapat dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak.
- f. Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

E. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perilaku menyimpang yang terjadi di dalam masyarakat. Perkembangan kejahatan akan selalu beriringan dengan perkembangan masyarakat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya perilaku kejahatan. Pada kesempatan ini, penulis

akan memaparkan beberapa teori-teori penyebab terjadinya suatu kejahatan, baik itu ditinjau dari perspektif biologis, psikologis maupun sosiologis.

1. Perspektif Biologis

Cesare Lambrosso merupakan salah satu pakar yang meneliti dan meninjau penyebab kejahatan dari perspektif biologis. Teori *born criminal* dari Cesare Lambrosso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lambrosso membantah sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Lambrosso mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu:²⁵

- 1) *Born Criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme
- 2) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau paranoid
- 3) *Occasional criminal, atau Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga

²⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas. Op.cit., hlm 35-36.

mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*)

- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Selain Cesare Lambrosso, ada beberapa pakar yang juga meninjau penyebab kejahatan dari perspektif biologis, diantaranya: Ernest Kretchmer, William H. Sheldon, Sheldon Glueck dan Elanor Glueck, Karl Christiansen dan Sanoff A. Mednick.

2. Perspektif Psikologis

Beberapa teori-teori mengenai sebab terjadinya kejahatan dari perspektif Psikologis, sebagai berikut:²⁶

a) Teori Psikonalis

Teori Psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap

²⁶ *Ibid.* hlm 40-45.

dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal atau asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis

b) Kekacauan Mental (Mental Disorder)

Mental *disorder* yang dialami oleh sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga permasyarakatan, oleh Philippe Pinel seorang dokter Perancis sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*) atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai „*moral incapity*” dan oleh Gina Lamrosso-Ferrero sebagai *irresistible atavistic impulse*. Pada dewasa ini, penyakit mental tadi disebut *antisosial personality* atau *psycopaty* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek dan tidak pernah merasa bersalah.

c) Pengembangan Moral (Development Theory)

Larance Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tubuh dalam tahap *preconvention stage* atau tahapan pra-konvensional, di mana aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkat pra-konvensional ini. Psikolog John Bowlb mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapatkan hal itu. Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan kasih sayang. John McCord menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurang percaya diri dari sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan.

d) Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*. Ada beberapa cara kita mempelajari tingkah laku, antara lain :

1) Observasi Learning

Tokoh utama teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*. Anak belajar bagaimana bertingkah-laku

secara ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa.

2) Direct Experience

Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pelajaran langsung (*direct experience*). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya, namun kadang-kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan.

3) Differential Association Reinforcement

Burgness dan Akers menggabungkan *learning theory* dari bandura dengan teori *Differential Association Reinforcement*. Menurut teori ini, berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung apakah ia diberi penghargaan atau hukuman.

3. Perspektif Sosiologis

Teori-teori sosiologis berbeda dengan teori-teori dari perspektif biologis dan psikologis. Teori-teori sosiologis berpendapat bahwa kejahatan terjadi karena adanya perbedaan kondisi dan kelas sosial di dalam masyarakat. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:²⁷

1) *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)

²⁷ *Ibid.* hlm 45-60.

Teori ini lebih fokus kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan tindakan kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Para penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah.

2) Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance*)

Berbeda dengan teori anomie, teori penyimpangan budaya beranggapan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya.

3) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

F. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Prof. E.H. Sutherland, salah satu mamfaat praktis dari pada Kriminologi adalah untuk menekan dan mengurangi jumlah kejahatan. Kita mengetahui bahwa pada masa-masa yang silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakuti-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai balasan.²⁸

Ada tiga bagian yang menjadi pokok dalam penanggulangan kejahatan secara empirik, yaitu:²⁹

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai moral/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan

²⁸ Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Alumni. 1976. hlm 51.

²⁹ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.cit.*, 79-80.

hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat ditambah Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala, maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya adalah ada orang yang ingin mencuri motor, tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan dengan upaya represif

dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari berbagai sumber yang terkait. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

A. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat, tepatnya pada Kepolisian Resor Polewali Mandar dan instansi-instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a) Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari instansi atau pihak terkait dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan.
- b) Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

- a) Data Primer, yaitu data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan cara

wawancara langsung dengan instansi atau pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b) Data Sekunder, yaitu data atau fakta yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan ataupun arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan instansi atau pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar

Sebelum membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar, maka penulis terlebih dahulu akan memaparkan beberapa data mengenai tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana perkosaan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. Data ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis melakukan penelitian di Polres Polewali Mandar, Pengadilan Negeri Polewali Mandar dan Lembaga Pemasyarakatan KLAS II B Polewali Mandar. Dari data tersebut, penulis kemudian dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polres Polewali Mandar, penulis memperoleh data mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Polewali Mandar dalam kurun waktu 2011-2013, seperti yang terlampir pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Data Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan dan Tindak Pidana
Perkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar

No	Tahun	Tindak Pidana Kesusilaan	Tindak Pidana Perkosaan
1	2011	24	10
2	2012	13	6
3	2013	18	8
Total		55	24

Sumber: Data Polres Polewali Mandar Tahun 2011-2013

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa sangat banyak kasus-kasus kesusilaan yang menimpa anak di Kabupaten Polewali Mandar. Khusus untuk tindak pidana perkosaan, dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa pada tahun 2011 terdapat 10 kasus, pada tahun 2012 terdapat 6 kasus dan di tahun 2013 terdapat 8 kasus.

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011-2013 kasus perkosaan terhadap anak terus terjadi setiap tahunnya. Bukan perkara mudah memang untuk mengungkap sebuah kasus perkosaan, ada beberapa faktor yang membuat aparat penegak hukum sulit untuk mengungkap sebuah kasus pemerkosaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar, Mihardi. M, S.H., S.IK pada hari Senin tanggal 7 April 2014 mengatakan bahwa ada 2 faktor yang menjadi kendala dalam mengungkap sebuah kasus perkosaan terhadap anak, yaitu :

1. Kondisi Topografi

Biasanya kasus-kasus pemerkosaan itu terjadi di daerah pelosok, yang mana akses untuk ke daerah tersebut sangat sulit untuk di jangkau. Hal ini tentunya akan membuat sulitnya akses informasi antara pihak kepolisian dan masyarakat karena daerah tersebut tidak mendapatkan pengawasan atau kegiatan patroli yang rutin dilakukan oleh aparat kepolisian setempat.

2. Adanya Budaya Siri'

Bukan hanya masyarakat suku Bugis saja yang mengenal adanya budaya siri', tetapi masyarakat suku Mandar yang ada di Kabupaten Polewali Mandar juga mengenal budaya siri'. Biasanya, setelah terjadi sebuah kasus pemerkosaan terhadap anak, pihak keluarga dari korban tidak langsung melaporkannya ke aparat penegak hukum setempat karena merasa itu adalah sebuah aib keluarga. Mereka takut akan mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat setempat.,

Berdasarkan data yang didapat dari Polres Polewali Mandar, pelaku tidak pidana perkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari berbagai kelompok umur. Adapun rata-rata umur dari pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar , adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Data Mengenai Rata-rata Umur Pelaku Tindak Pidana Perkosaan
Terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar.

No	Umur	Jumlah
1	10-20 Tahun	19
2	21-30 Tahun	11
3	31-40 Tahun	-
Total		30

Sumber: Data Polres Polewali Mandar Tahun 2011-2013

Dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa mayoritas pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di kabupaten Polewali Mandar adalah usia muda atau usia sekolah yaitu antara 10-20 tahun dengan jumlah 19 orang, sedangkan selebihnya berusia antara 21-30 tahun yang notabene adalah usia produktif.

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, melihat fakta bahwa sebagian besar pelaku perkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar adalah usia muda. Masa muda seharusnya diisi dengan berbagai kegiatan dan perilaku positif, bukan malah menghabiskannya dengan berbagai kegiatan dan perilaku negatif atau menyimpang.

Selain data mengenai usia pelaku, terdapat juga data mengenai pekerjaan pelaku yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Data Mengenai Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap
Anak di Kabupaten Polewali Mandar.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Wirausaha	9
2	Pelajar	7
3	Petani	6
4	Nelayan	1
5	Buruh Bangunan	2
6	Peternak	1
7	Pegawai Honorer	1
8	Karyawan	1
9	Polisi	1
10	Tidak Ada	1
Total		30

Sumber : Pengadilan Negeri Polewali Mandar

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pekerjaan pelaku adalah wirausaha kemudian pelajar, petani, nelayan, buruh bangunan, peternak, pegawai honorer, karyawan, polisi dan bahkan ada 1 orang pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran).

Sangat memprihatinkan memang ketika melihat data diatas, dimana salah satu pelaku pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar adalah seorang polisi. Polisi adalah salah satu aparat penegak hukum yang pada dasarnya bertugas untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat, bukan malah merendahkan hukum dengan

cara melakukan perbuatan menyimpang seperti melakukan pemerkosaan dan lain-lain sebagainya.

Setelah memaparkan data mengenai rata-rata usia dan pekerjaan pelaku, maka selanjutnya akan di paparkan data mengenai rata-rata usia korban tindak pidana perkosaan terhadap anak di kabupaten Polewali Mandar. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Data Mengenai Rata-rata Umur Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar.

No	Umur	Jumlah
1	1-5 Tahun	-
2	6-10 Tahun	-
3	11-17 Tahun	24
Total		24

Sumber: Data Polres Polewali Mandar Tahun 2011-2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa usia korban tindak pidana perkosaan terhadap anak dalam kurun waktu tahun 2011-2013 semuanya adalah berusia 11-17 tahun dengan jumlah 24 orang. Melihat usia rata-rata korban yang masih sangat muda tentu merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan karena itu dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak, yang dimana anak akan mengalami trauma, malu bergaul (anti sosial), stress dan tidak percaya diri (pesimistis).

Selanjutnya penulis akan memapaparkan data mengenai hubungan pelaku dengan korban yang datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5

**Data Mengenai Hubungan Pelaku dengan Korban Tindak Pidana
Perkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar.**

No	Hubungan	Jumlah
1	Pacaran	20
2	Teman Sekolah	1
3	Tidak Ada	3
Total		24

Sumber: Data Polres Polewali Mandar Tahun 2011-2013

Berdasarkan data yang ada diatas, kita dapat melihat bahwa mayoritas hubungan antara pelaku dengan korban adalah teman dekat (pacaran). Hal ini berarti bahwa pada dasarnya pelaku dengan korban sudah saling mengenal satu sama lain. Fakta ini seakan memperjelas ungkapan yang sering kita dengar bahwa kejahatan bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja, bahkan itu teman dekat sekalipun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Resor Polewali Mandar, Pengadilan Negeri Polewali Mandar dan hasil wawancara langsung dengan pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan KLAS II B Polewali Mandar, maka penulis akan memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku yang bernama Rahmat di Lembaga Pemasyarakatan KLAS II B Polewali Mandar, mengatakan bahwa Ia melakukan perbuatan itu karena adanya ajakan dari teman. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan dapat mengubah perilaku seseorang menjadi buruk ataupun jahat. Cerdas dalam memilih teman bergaul adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti yang dipaparkan pada tabel 5, dimana mayoritas hubungan pelaku dengan korban ternyata adalah teman dekat (pacaran).

2. Faktor Alkohol (Minuman Keras)

Terjadinya kasus perkosaan terhadap anak juga dipengaruhi oleh akibat dari meminum minuman beralkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol akan kehilangan daya kontrol terhadap dirinya dan dapat melakukan hal-hal yang tak terduga. Hal ini tentunya sangat berbahaya apalagi jika yang bersangkutan memang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, yang mana apabila Ia berada dibawah pengaruh alkohol maka itu

dapat mengakibatkan dirinya tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya, sehingga anak dibawah umur pun terkadang menjadi korban pelampiasan hawa nafsunya tersebut.

Faktor pengaruh alkohol ini juga menjadi alasan salah satu pelaku bernama Mukhlis. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pelaku, Ia mengatakan bahwa perbuatan perkosaan itu dilakukannya setelah Ia meminum minuman keras bersama teman-temannya sehingga tidak mampu lagi mengendalikan dirinya (mabuk).

3. Faktor Teknologi

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, tak terkecuali di Kabupaten Polewali Mandar. Hampir setiap hari kita bersinggungan dengan yang namanya teknologi. Dengan adanya teknologi seperti internet maka akses informasi tentunya semakin mudah untuk di dapatkan. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika ketika teknologi itu malah digunakan untuk hal-hal negatif. Internet memudahkan seseorang untuk mengakses film-film porno yang pada dasarnya dapat mempengaruhi gairah seksual seseorang. Ketika hasrat seksual seseorang tak terbendung lagi, terkadang mereka melakukan hal-hal yang buruk dan menyimpang, termasuk melakukan perkosaan terhadap anak dibawah umur.

4. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk.

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku yang bernama Sumailah. Pelaku mengatakan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut (perkosaan terhadap anak) karena khilaf. Ini membuktikan bahwa iman yang dimiliki oleh pelaku sebagai orang yang beragama masih sangat lemah. Jadi, kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan kontrol sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan pemerkosaan terhadap anak, penulis mencoba untuk memaparkan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan guna menanggulangi kejahatan ini.

Usaha penanggulangan suatu kejahatan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya, tetapi kita bisa meminimalisirnya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kabupaten Polewali Mandar, maka selanjutnya penulis akan menguraikan siapa saja yang bertanggung jawab dan apa saja yang perlu dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana perkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar.

1. Upaya Preventif

a. Individu

Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha agar tidak menjadi korban kejahatan, khususnya tindak pidana perkosaan. Salah satunya yaitu dengan cara tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan, serta lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tidak mudah tergoda untuk melakukan hal-hal buruk.

b. Masyarakat

Kehidupan masyarakat terdiri dari berbagai macam karakter individu, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu

adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau kesempatan untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan dibidang asusila terutama perkosaan terhadap anak.

Pencegahan kejahatan asusila khususnya perkosaan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin oleh setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu dengan menciptakan suasana yang tidak menyimpang dari tataran nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Usaha itu dapat diawali dengan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan aman.

c. Pihak Pemerintah

Pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari Negara, maka pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram.

Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengadakan penyuluhan hukum. Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana perkosaan adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat

memahami dan menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan mempunyai sanksi atau hukuman.

d. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memegang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan diantaranya adalah melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, optimalisasi kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, memberantas peredaran minuman keras, serta rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

2. Upaya Represif

Selain upaya preventif, juga diperlukan adanya upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan termasuk mengenai kasus perkosaan terhadap anak.

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan.

Untuk pihak kepolisian, tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri.

Kemudian di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku, dengan ini diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali.

Sementara bagi pihak Lembaga Permasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar adalah:
 - a. Faktor Lingkungan
 - b. Faktor Alkohol
 - c. Faktor Teknologi
 - d. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama
- 2) Upaya dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar adalah:
 - a. Melalui upaya preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian.
 - b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan.

B. Saran

- 1) Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak, seharusnya pihak kepolisian dengan rutin melakukan patroli khususnya di daerah pelosok yang selama ini kurang di perhatikan. Selain itu dibutuhkan kerjasama dari masyarakat, yaitu dengan

langsung melaporkan kepada pihak kepolisian apabila telah terjadi sebuah tindak kejahatan, termasuk kejahatan pemerkosaan terhadap anak. Selain itu dibutuhkan juga peran aktif dari tokoh masyarakat serta ulama untuk memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral etika dan juga mengenai dampak yang dapat ditimbulkan.

- 2) Agar polisi tidak hanya fokus pada upaya represif, tetapi juga harus sering melakukan upaya preventif sebagai langkah pencegahan.
- 3) Agar pemerintah lebih memperhatikan lagi perlindungan terhadap anak, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang betul-betul kita harus jamin kesejahteraanya.
- 4) Semua peraturan hukum yang telah dibuat harus betul-betul diterapkan sebagaimana fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Cetakan Ke-1. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- D, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Kartini, Kartono. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju..
- Marpaung, Leden. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saherodji, Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- dan Eva Achjani. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- dan Achjani Zulfa, Eva. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soesilo, R. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Bogor: Politea.
- Soetodjo, Wagiaty. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Refika Aditama.
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Visimedia.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.